

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ploso sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ploso, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ploso diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

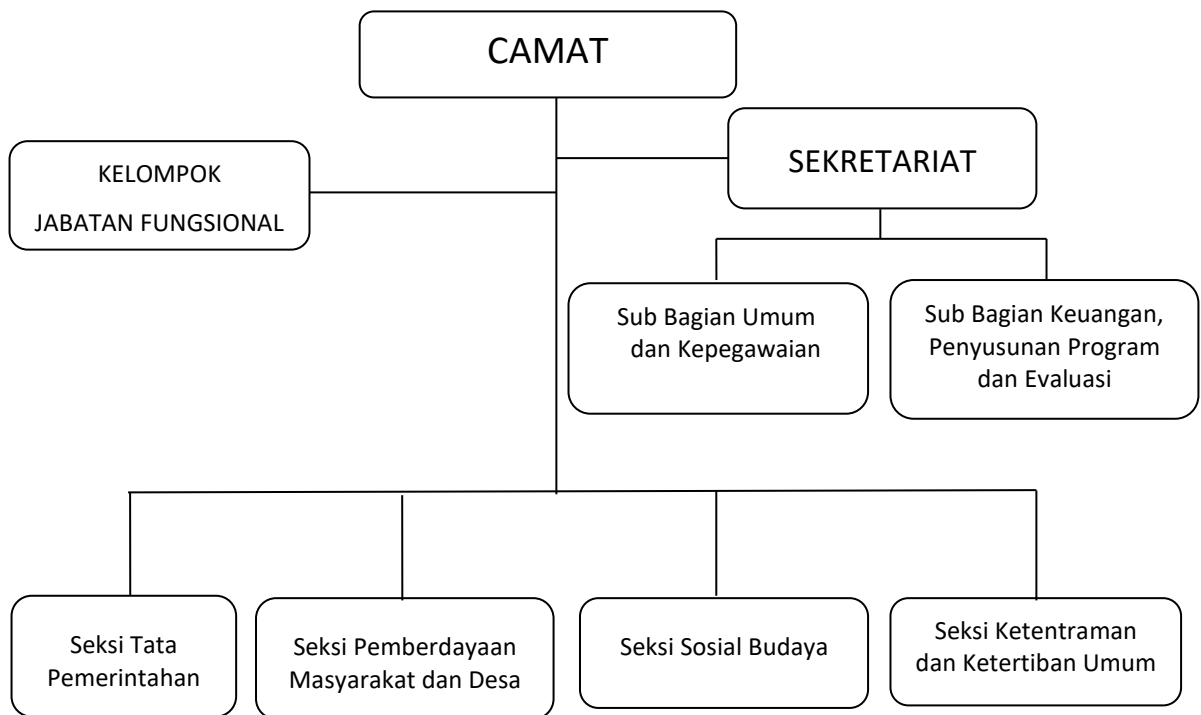
1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ploso



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Ploso, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Ploso

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	TRIDOYO PRNOMO,S.STP	197805171998101001	Camat
2	MOCH. FATCHURRAHMAN,SP.MM	196911241996021001	Sekcam
3	SALAM PURWANTO.SH	196803271992021001	Kasi Tapem
4	LILIK HANDAYANI.S.Sos	197506081999012001	Kasi Sosbud
5	HADI SANTOSO,SE	197205231994031006	Kasi PMD
6	AHMAD SYAIKHUL JABARA.S.STP.MM	198407112004121001	Kasi Trantibum

7	SUHARIANI.S.Sos	197309061995022002	Kasubag. Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi
---	-----------------	--------------------	---

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Ploso

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	MUHAMMAD MUNIR	196906022009061001	Staf
2.	KAMARI	197004072009061001	Staf
3	WALUYANTO	197103222009011002	Staf
4	DIDIK SUSANTO	198409082010011002	Staf
5	JUNianto	197406162010011002	Staf
6	ISMAIL	197004162010011003	Staf

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- 5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;

7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;

2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-

permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD

Tingkat Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Ploso dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Ploso sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Ploso.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Ploso yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ploso sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Ploso terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak,

kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso pada tahun 2024 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam **Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2024 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel**, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

1.4 CASCADING

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang, Tema/Arah Pembangunan daerah tahun 2024 adalah “Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis Agribisnis dan SDM unggul”. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Indikator tujuan RPD ini adalah Indeks Good Governance.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

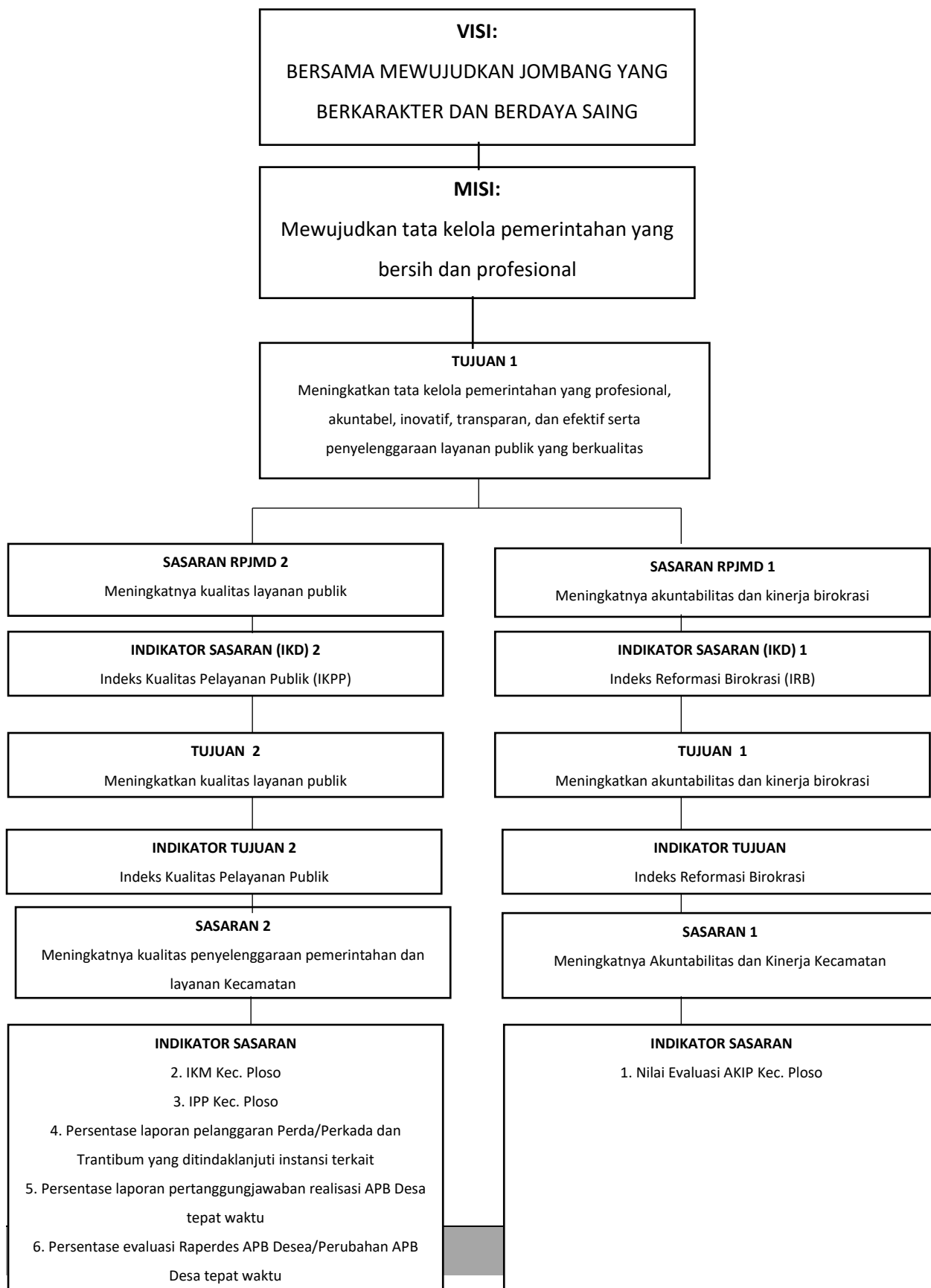
Tujuan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
1. Meningkatkan kualitas layanan publik

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

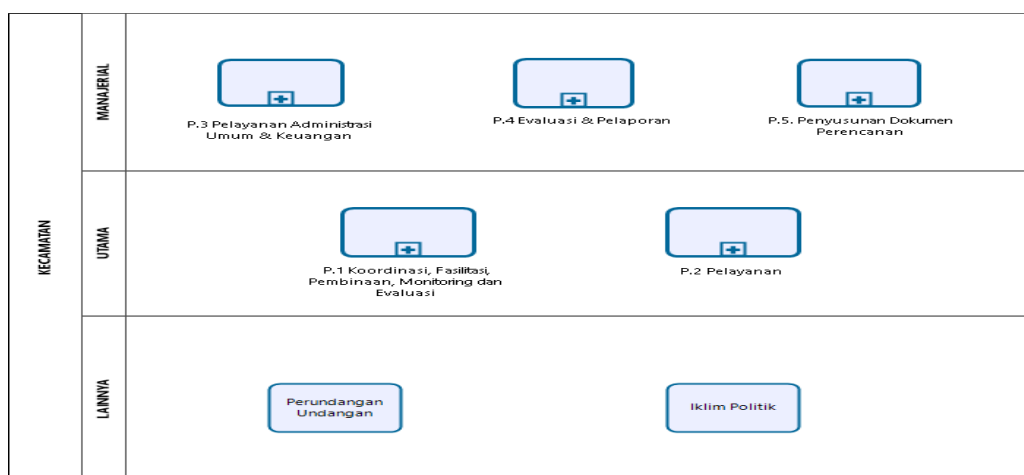
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan.

Adapun keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagai berikut :



1.5 PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:

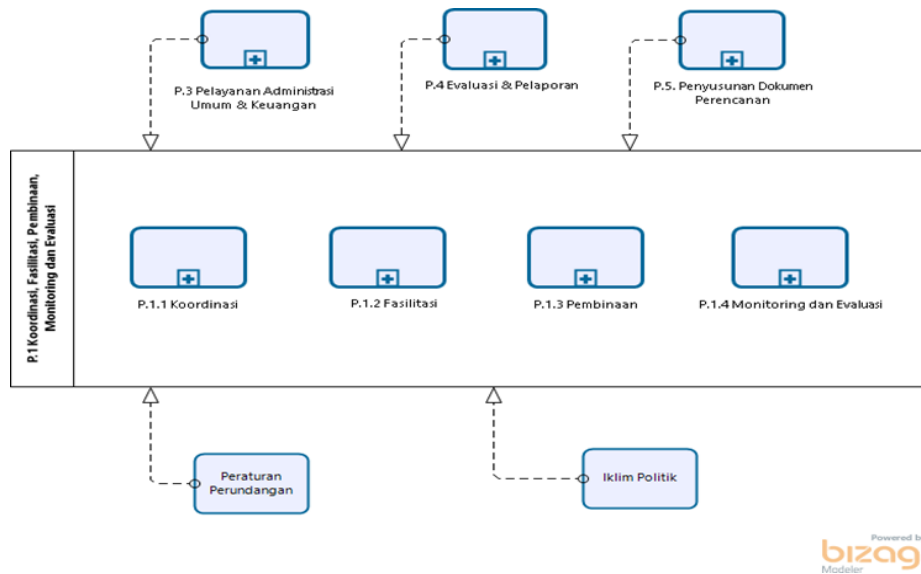


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 1.2 Proses Utama Kecamatan

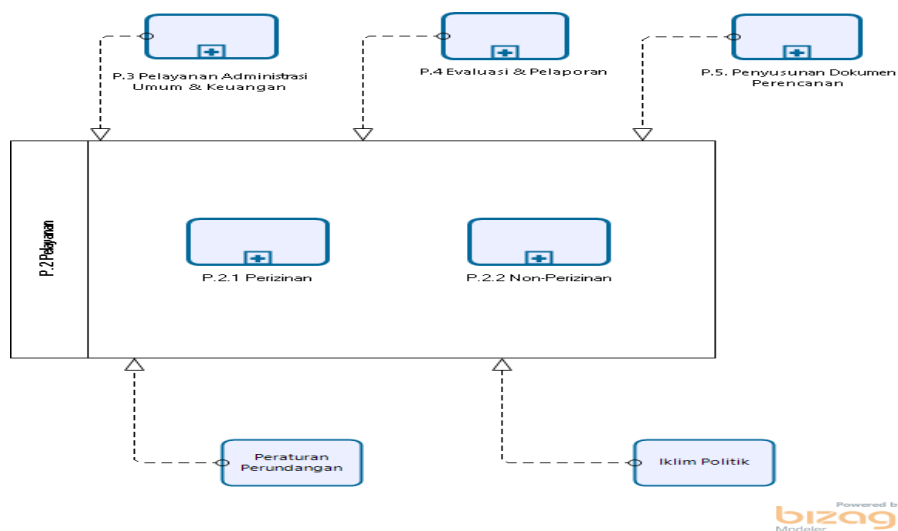
Proses utama Kecamatan Ploso terdiri dari

- a. P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
Kecamatan mempunyai proses utama dengan OPD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.



b. P.2 Pelayanan

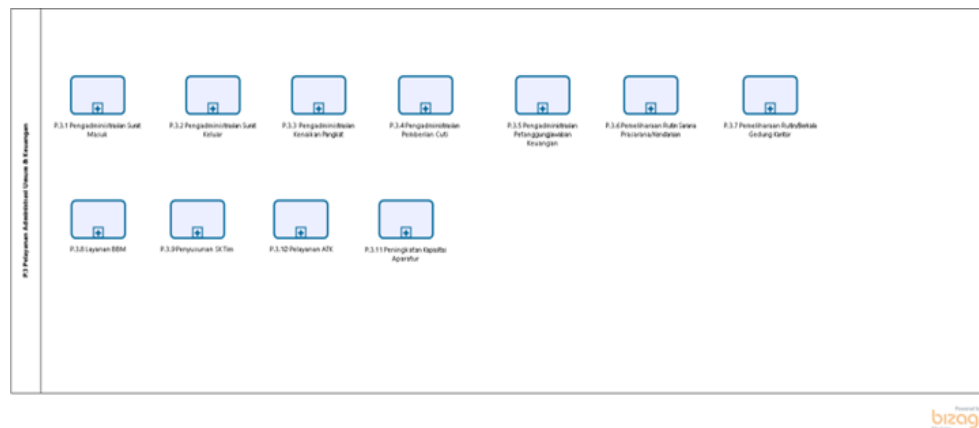
Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, KIA dan pindah penduduk, juga pelayanan perizinan seperti penerbitan izin usaha.



Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

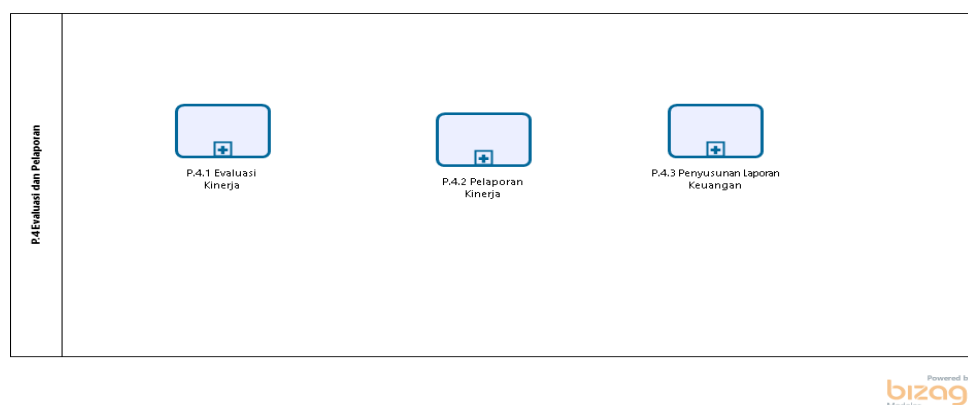
a. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKD terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.



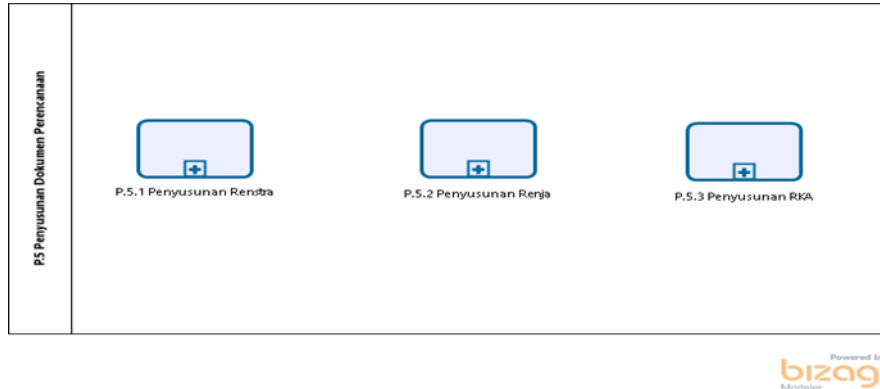
b. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

A. NILAI SAKIP

➤ Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/526/415.15/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Ploso Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2024 adalah 74,18 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen

AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Ploso Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,49	78,30
2	Pengukuran Kinerja	30 %	18,14	60,47
3	Pelaporan Kinerja	15 %	13,02	86,80
4	Evaluasi Kinerja	25 %	19,53	78,12
	Total	100 %	74,18	

➤ Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Ploso.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Ploso Kabupaten Jombang, agar :

1. Menyajikan hambatan pencapaian indikator kinerja secara konkrit pada Berita Acara Monitoring Jangka Menengah.
2. Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (Refocusing) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan
3. Memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja
4. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya.

B. NILAI REFORMASI BIROKRASI

➤ Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 000.8.6/10031/415.10/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso Tahun 2024, nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Ploso Tahun 2024 adalah 73,68 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Hasil Nilai Reformasi Birokrasi Kec Ploso Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	3,89
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,00
	Rencana Aksi	4%	1,33
	Monitoring dan Evaluasi	4%	1,56
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	69,79
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38,73
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31,05
Indeks Reformasi Birokrasi		100%	73,68

Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
-----------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------------

1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 - 100		
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 - 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Indeks Penerapan SPBE	0 - 100	73,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 - 100	90,00	BAPPEDA
5	Nilai SAKIP	0 - 100	74,18	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 - 100	100,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pembangunan ZI	0 - 5	3,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Maturitas SPIP	0 - 5	3	Inspektorat
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	0 - 5	2,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 - 4	3,99	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 - 100	75,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 - 100	90,00	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 - 100	100,00	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	0 - 100	89,79	BPKAD
15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 - 100	98,80	Inspektorat
16	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 - 100	100,00	BKPSDM
17	Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	82,73	BKPSDM
18	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 - 4	2,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19	Indeks Pelayanan Publik	0 - 5	3,37	Bagian Organisasi

				Sekretariat Daerah
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 - 100	98,70	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

- Rekomendasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso
- Beberapa hal yang menjadi catatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
 - a. Agen Perubahan telah ditetapkan, namun belum memberikan kontribusi terhadap perubahan pada Perangkat Daerah, Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB.
 - b. Kualitas rencana aksi masih belum optimal, beberapa rencana aksi masih berfokus hanya pada pemenuhan dokumen Agen perubahan dapat membuat proyek kecil yang implementatif dan berdampak pada unit kerja dengan langkah-langkah antara lain menyusun, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan rencana tindak
 - c. Kurangnya optimalnya proses Monev Internal dalam mengawal dan memastikan kualitas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RB dalam rangka memaksimalkan capaian pembangunan RB Melakukan analisis dan pahami seluruh catatan dan rekomendasi yang kemudian disusun rencana tindak lanjut serta direalisasikan dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pembangunan RB, Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi
 - d. Tim Kerja yang telah dibentuk belum mencerminkan Implementasi Peraturan

Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, MPH yang disajikan adalah MPH Perangkat Daerah dan bukan merupakan MPH Tim Kerja, segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang system kerja untuk penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan di kelola dengan pemanfaatan aplikasi e-kinerja BKN.

- e. Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian poin 9 huruf a Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024
- f. Pernah diusulkan ke Kementerian PANRB namun tidak melanjutkan proses pembangunan Zona Integritas Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutatan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
- g. Nilai SPIP mengikuti nilai maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari
- h. menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern Kurangnya sosialisasi, Kualitas tindak lanjut aduan kurang baik dan kurang responsif, Pelapor kurang puas dengan pelayanan yang diberikan disarankan untuk sosialisasi ke masyarakat , monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindaklanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, perlu dilakukan perbaikan pelayanan.

- i. Indeks Pengawasan Kearsipan unit pengelola agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan, Seluruh arsip aktif yang disimpan oleh Unit Pengolah agar dibuatkan daftar arsip aktif, Seluruh arsip inaktif yang disimpan oleh Unit Kearsipan agar dibuatkan daftar arsip inaktif, Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis, Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center
- j. Indeks Tata Kelola Pengadaan belum melaksanakan pencatatan non tender, Agar melaksanakan pencatatan non tender
- k. Indeks Profesionalitas ASN, Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi karena masih 30.42 dari Nilai Kompetensi maks 40. Dimensi Kinerja 25.00 dari Nilai Kinerja maks 30 Kecamatan Ploso Skala 0-100 dengan Nilai 82,73
- Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kecamatan Ploso, rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1. Menyosialisasikan dan internalisasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkup Kecamatan Ploso, serta lebih meningkatkan keterlibatan pimpinan sehingga pencapaian indikator-indikator kegiatan utama dapat dimaksimalkan;
 - 2. Melaksanakan evaluasi atas pembentukan Agen Perubahan dan berkoordinasi dengan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang agar dilaksanakan seleksi dan pembangunan Agen Perubahan. Sehingga kedepan Agen Perubahan yang telah terbentuk dapat mempunyai program kerja yang jelas dan memberikan kontribusi perubahan lebih baik di lingkungan Kecamatan Ploso;
 - 3. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti hasilnya;

- 4. Melaksanakan perbaikan pada dimensi yang masih lemah/terdapat kekurangan sebagaimana tercantum pada Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/27/415.10.1.3/2024 tentang Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- 5. Melaksanakan perbaikan pada komponen penerapan SPBE Perangkat Daerah yang masih lemah, sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor: 473.1/1067/415.23/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024;
- 6. Memperbaiki manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Ploso, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun 2024;
- 7. Melaksanakan perbaikan capaian TDLPD pada tahun berikutnya dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Jombang Nomor: 1884.45/376/415.10.1.3/2024 tentang tentang Tingkat Digitalisasi Pelayanan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;
- 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, dan mulai menerapkan mekanisme arsip digital;
- 9. Melaksanakan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- 10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP;
- 11. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pembinaan disiplin ASN, peningkatan kinerja, serta pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal;
- 12. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi,

kampanye, serta melalui media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan

pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ploso pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran RPD Tema/arrah pembangunan daerah tahun 2024 adalah “Pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis dan SDM unggul” adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Ploso tahun 2024-2026

adalah sebagai berikut :

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Indikator : Indeks Kualitas Pelayanan Publik

dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan

Indikator :

- Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan.

Indikator :

- IKM Kecamatan Ploso
- IPP Kecamatan Ploso
- Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
- Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu
- Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

- Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Ploso menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (subkegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ploso atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ploso Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ploso Tahun 2024-2026, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ploso untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ploso
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso	73
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ploso	8,03

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	2.626.137.164

2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,50	3.470.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	89.639.600
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	4.520.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	5.075.000

5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	40.287.500
					2.769.129.264

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ploso dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ploso	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Ploso
		Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Ploso
		Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/ Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/ Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana		
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ploso	IPP Kecamatan Ploso tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Ploso
		Definisi Operasional: Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian,		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017)		
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang tindaklanjuti instansi terkait ----- x 100 % Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
		Definisi Operasional: Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang telah ditindaklanjuti instansi terkait setelah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum dikoordinasikan ke instansi terkait		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Laporan Evaluasi LRA Desa
		Definisi Operasional: Setiap desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes yaitu dokumen (LRA beserta Perdesnya) paling lambat akhir Bulan Januari setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Pertanggungjawaban APBDes dievaluasi oleh Tim Verifikator dan Pembina APBDes Kecamatan		
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa	Laporan Evaluasi Raperdes APBDesa
		Definisi Operasional: Desa wajib menyusun Raperdes APBDes/ Perubahan APBDes. Raperdes ini dievaluasi oleh		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		Tim Verifikator dan Pembina APBDes Kecamatan. Raperdes APBDes disusun Desa sebanyak 2x untuk Raperdes APBDes disusun pada bulan Desember-Januari, sedangkan Perubahan APBDes disusun pada bulan September-Oktober		

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ploso, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Ploso	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
			SKPD	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit
	Pengadaan aset tetap lainnya	Terlaksananya Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	11 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 Lembaga
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ploso sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 110% - 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 90% - 110%	Baik (Berhasil)
3	> 70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 50% - 70%	Kurang
5	0% - 50%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 120% (seratus dua puluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 120% (seratus dua puluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0% (nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ploso memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ploso diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Ploso memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ploso tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ploso Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS -PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,1	98,70	109,54%
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	84,36	101,02%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%

Kelurahan	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%
-----------	---	------------	------------	------

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,1	98,70	109,54%
		IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%
		Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN IKU					100,371%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ploso Tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, dimana dari 6 indikator kinerja ada 5 indikator yang telah memenuhi target dan ada 1 indikator IKU yang tidak memenuhi target dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 73 terealisasi 74,18 (tercapai 101,61%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor X.700/533/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Data Pendukung Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,49	Pemenuhan kualitas dan implementasi perencanaan kinerja sudah memadai

2.	Pengukuran Kinerja	30%	18,14	Kualitas sebagian kecil kreteria telah terpenuhi Terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian adalah: a.terdapat mekanisme yang jelas terhadap mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan namun belum terdapat kemudahan mengakses data maupun untuk menelusuri sumber data b. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capain kinerja yang diharapkan,serta belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c.pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesesauian strategi,kebijakan,aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja d. setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan perduli atas hasil pengukuran kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,02	Kualitas seluruh kreteria telah dipenuhi sesuai dengan mandat kebijakan,namun masih belum terdapar hal yang perlu mendapat perhtian adalah

				a. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam i. Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja ii. Penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja iii. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja iv. Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya b. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
4.	Evaluasi Kinerja	25%	19,53	Kualiatas sebaian besar kreteria telah terpenuhi namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian; a. Telah terjadi peningkatan Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi ,namun belum menunjukan perbaikan yang seknifikan b. hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akutanbilitas kinerja. c. Hasil dari evaluasi akutanbilitas kinerja belum dimanfaatkan

				dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja d. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akutanbilitas kinerja e. Terdapat target yang tidak tercapai f. Capaian kinerja tidak lebih baik dari sebelumnya
Jumlah		100%	74,18	

Berdasarkan pada tabel diatas, Kecamatan Ploso pada tahun 2024 akan melakukan strategi perbaikan AKIP sebagai berikut :

1. Menyajikan hambatan pencapaian indikator kinerja secara konkrit pada Berita Acara monitoring jangka menengah.
2. Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.
3. Memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja
4. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya.
5. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.
6. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP
7. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso dengan indikator kinerja :

1. IKM Kecamatan Ploso

IKM Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 90,1 terealisasi 98,70 (tercapai 109,54%). Nilai IKM Kecamatan Ploso telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana (mengajukan tambahan anggaran PAK 2024 untuk untuk pembangunan gedung PATEN dan kantor kecamatan serta pengadaan sarana prasarana PATEN seperti CCTV dan Mesin antrian) serta peningkatan kompetensi petugas berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Ploso per jenis layanan :

Tabel 3.4
Komponen Hasil Penilaian IKM Kecamatan Ploso Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	IKM 2024
1.	KTP	99,07
2.	KK	98,66
3.	SKCK	97,53
4.	Mutasi / Pindah Kependudukan	100
5.	Surat Keterangan Lainnya	99,6
IKM Unit Layanan		98,70

2. IPP Kecamatan Ploso

IPP Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 3,7 terealisasi 3,37(capaian 91,08%). Nilai IPP Kecamatan Ploso belum berhasil mencapai target yang ditetapkan karena pada saat penilaian IPP sarana dan prasarana pendukung PATEN sebenarnya sudah dianggarkan pada P-APBD 2024 (Pemeliharaan Gedung Paten, Service Mesin Antrian) namun belum dapat direalisasikan karena angkas P-APBD 2024 dianggarkan di Bulan Oktober 2024, sementara penilaian IPP dilakukan pada 30 September 2024. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 berdasarkan hasil IPP tahun 2024 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

a. Aspek pelayanan:

- Menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan unsur masyarakat.
- Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.
- Standar Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial
- Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
- Melakukan survey kepuasan masyarakat dengan menyediakan kotak kepuasan pelayanan
- Setiap unit layanan menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi SKM

g. Aspek Profesionalisme SDM:

- Memberikan respon layanan secepatnya
- h. Aspek sarana dan prasarana:
- Mengajukan tambahan anggaran PAK 2024 untuk pembangunan gedung PATEN dan service Mesin Antrian)
 - Menyediakan petugas khusus yang membantu untuk pengguna layanan difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya.
- i. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
- Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
- j. Aspek Konsultasi dan Pengaduan
- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 - Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
- f. Inovasi
- Pelayanan kecamatan Ploso mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon

Tabel 3.5
Data Pendukung IPP Kecamatan Ploso Tahun 2024

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
INDEX F02				
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%		
2.	Aspek Profesional SDM	18%		
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%		
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%		
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%		
6.	Inovasi	7%		
INDEX F03				
Indeks Pelayanan Publik				3,37

3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

- Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berkat kerjasama yang baik antar stakeholder.
- Pada tahun 2024 di Kecamatan Ploso tidak terdapat kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum (sesuai dengan Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum Kecamatan Ploso yang dilaporkan ke Satpol PP setiap bulan) sehingga indikator persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait tercapai 100%.
4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu.
- Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berkat kerjasama yang baik dengan desa.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2024 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2024.
- Setiap desa di Kecamatan Ploso telah melaporkan realisasi APBDesa tepat waktu berupa LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu yaitu dilakukan maksimal Bulan Januari 2024 dengan data sbb:

Tabel 3.6
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran (LRA) APBDes
di Kecamatan Ploso Tahun 2024

NO	DESA	LRA APBDes	
		NO PERDES	TANGGAL
1	Tanggungkramat	03 Tahun 2024	31/12/2024
2	Rejoagung	13 Tahun 2024	30/12/2024
3	Losari	08 Tahun 2024	31/12/2024
4	Kebonagung	03 Tahun 2024	31/12/2024
5	Bawangan	04 Tahun 2024	31/12/2024
6	Jatigedong	5 Tahun 2024	31/12/2024
7	Daditunggal	03 Tahun 2024	31/12/2024
8	Gedongombo	05 Tahun 2024	31/12/2024
9	Jatibanjar	06 Tahun 2024	31/12/2024

10	Pandanblole	7 Tahun 2024	31/12/2024
11	Pagertanjung	09 Tahun 2024	31/12/2024
12	Kedungdowo	03 Tahun 2024	31/12/2024
13	Ploso	04 Tahun 2024	31/12/2024

5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu.

Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%).

Setiap Desa di Kecamatan Ploso telah menyusun APBDes dan Perubahan APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen. P-APBDes tahun 2024 ditetapkan maksimal 31 Oktober 2024 dan APBDes 2024 ditetapkan maksimal 31 Desember 2024 dengan data sbb:

Tabel 3.7
Data P-APBDes 2024 dan APBDes 2024
di Kecamatan Ploso Tahun 2024

NO	DESA	P-APBDes 2024		APBDes 2024	
		NO PERDES	TANGGAL	NO PERDES	TANGGAL
1	Tanggungkramat	4 Tahun 2024	12-Oct-23	3 tahun 2024	31-Dec-23
2	Rejoagung	9 Tahun 2024	14-Oct-23	13 tahun 2024	31-Dec-23
3	Losari	5 Tahun 2024	14-Oct-23	6 tahun 2024	31-Dec-23
4	Ploso	6 Tahun 2024	20-Oct-23	4 tahun 2024	31-Dec-23
5	Jatigedong	5 Tahun 2024	16-Oct-23	8 tahun 2024	31-Dec-23
6	Daditunggal	8 Tahun 2024	16-Oct-23	3 tahun 2024	31-Dec-23
7	Gedongombo	7 Tahun 2024	18-Oct-23	5 tahun 2024	31-Dec-23
8	Jatibanjar	6 Tahun 2024	12-Oct-23	6 tahun 2024	31-Dec-23
9	Pagertanjung	8 Tahun 2024	20-Oct-23	9 tahun 2024	31-Dec-23
10	Pandanblole	4 Tahun 2024	22-Oct-23	1 tahun 2024	31-Dec-23
11	Kedungdowo	5 Tahun 2024	22-Oct-23	3 tahun 2024	31-Dec-23
12	Kebonagung	5Tahun 2024	21-Oct-23	4 tahun 2024	31-Dec-23
13	Bawangan	5 Tahun 2024	24-Oct-23	4 tahun 2024	30-Dec-23

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja utama belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, dimana baru tercapai 98,48% namun masih dalam kategori **BAIK (BERHASIL)**. Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ploso Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja IKU sampai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	84,36	101,02%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM				100,18%

Dari data diatas dapat disimpulkan capaian kinerja program tahun 2024 adalah 100,18% (melebihi target yang telah ditetapkan), dengan rincian sbb:

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur target 100% dapat tercapai 100%.
Pencapaian ini berdasarkan hasil perhitungan formulasi capaian kinerja seluruh PNS dibagi jumlah PNS. Seluruh PNS capaian kinerja adalah 100% sehingga rata-rata capaian kinerja aparatur tercapai 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian

kinerjanya adalah 101,66%, dari indikator program yaitu nilai Paten Kecamatan, dimana ditargetkan nilai 86,50 dapat tercapai nilai 87,94 (101,66%). Nilai ini berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Nomor 138/12153/415.10/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Hasil Penilaian PATEN tahun 2024.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu :

- Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Kegiatan PBHN/PHBA yang dilaksanakan ada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peringatan HUT RI (sesuai dengan Kegiatan PHBN/PHBA) yang direncanakan pada DPPA 2024 sehingga capaian kinerjanya 100%.

- Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Kecamatan Ploso telah melaksanakan koordinasi Forkopimcam setiap tribulan pada tahun 2024 dan semua rekomendasinya telah ditindaklanjuti.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Pada tahun 2024 di Kecamatan Ploso tidak terdapat kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum (sesuai dengan Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum Kecamatan Ploso yang dilaporkan ke Satpol PP setiap bulan) sehingga indikator persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait tercapai 100%.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu :

- Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Setiap desa di Kecamatan Ploso telah melaporkan realisasi APBDesa tepat waktu berupa LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu yaitu

dilakukan maksimal pada Januari 2024.

- Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Berita Acara Monev Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes (13 Desa) semuanya telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu:

- Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

Setiap Desa di Kecamatan Ploso telah menyusun APBDes dan Perubahan APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen. P-APBDes tahun 2024 ditetapkan maksimal 31 Oktober 2024 dan APBDes 2024 ditetapkan maksimal 31 Desember 2024.

- Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif dengan target 26 lembaga dapat terealisasi 26 lembaga (capaian 100%). Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif adalah PKK dan BUMDes masing-masing desa (13 Desa x 2 lembaga = 26 lembaga).

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran – Sub Kegiatan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100%
Kegiatan Administrasi	Persentase Pencairan gaji dan	100%	100%	100%

Keuangan Perangkat Daerah	tunjangan ASN tepat waktu			
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 orang/bulan	12 orang/bulan	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 paket	38 paket	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	100%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	26 laporan	100%
Kegiatan Pemeliharaan	Persentase Barang Milik	85%	85%	100%

<i>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Daerah dalam kondisi baik</i>			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	9 unit	9 unit	100%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 unit	9 unit	100%
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,01	98,70	109,54%
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	73,75	88,32%
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<i>Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA</i>	1 laporan	1 laporan	100%
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	4 dokumen	4 dokumen	100%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda /	100%	100%	100%

Ketertiban Umum	Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait			
<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	26 dokumen	26 dokumen	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%
<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	26 lembaga	26 lembaga	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2021)	TAHUN N-1 (2022)	TAHUN 2024
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	68,38	72,14	74,18
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,01	98,17	98,57	98,70
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	0	3,16	3,37

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2021)	TAHUN N-1 (2022)	TAHUN 2024
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	86,76	73,75	84,36
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2021)	TAHUN N-1 (2022)	TAHUN 2024
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	68,38	72,14	74,18
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,1	98,17	98,57	98,70
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	0	3,16	3,37
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas rata-rata capaian kinerja sasaran mulai tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami kenaikan, namun ada 1 (satu) indikator sasaran yang mengalami penurunan.

Berikut kami sajikan perbandingan realisasi kinerja (sasaran) tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai evaluasi AKIP Kecamatan Ploso tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai evaluasi AKIP tahun 2022 adalah 68,38

Nilai evaluasi AKIP tahun 2023 adalah 72,14

Nilai evaluasi AKIP tahun 2024 adalah 74,18

Pada tahun 2024 meningkat 2,04% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 meningkat 3,37% dibandingkan tahun 2022

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan

Kecamatan Ploso

Indikator sasaran :

1. IKM Kecamatan Ploso

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKM Kecamatan Ploso tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai IKM tahun 2022 adalah 98,17

Nilai IKM tahun 2023 adalah 98,57

Nilai IKM tahun 2024 adalah 98,70

Pada tahun 2024 meningkat 0,13% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 meningkat 0,4% dibandingkan tahun 2022

2. IPP Kecamatan Ploso

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa IPP Kecamatan Ploso tahun 2024 turun dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai IPP tahun 2022 adalah 0

Nilai IPP tahun 2023 adalah 3,16

Nilai IPP tahun 2024 adalah 3,37

Pada tahun 2024 Meningkat 0,21% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 turun 3,16% dibandingkan tahun 2022

Nilai IPP Kecamatan Ploso belum berhasil mencapai target yang ditetapkan karena pada saat penilaian IPP sarana dan prasarana pendukung PATEN sebenarnya sudah dianggarkan pada P-APBD 2024 (Gedung Paten dan mesin Antrian) namun belum dapat direalisasikan karena angkas P-APBD 2024 dianggarkan di Bulan Oktober 2024, sementara penilaian IPP dilakukan pada 30 September 2024. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 berdasarkan hasil IPP tahun 2024 akan dilakukan perbaikan pada aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022

dan 2023. Setiap kasus pelanggaran Perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu.
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023. Setiap desa di Kecamatan Ploso telah melaporkan realisasi APBDesa tepat waktu berupa LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu.
5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu.
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023. Setiap Desa di Kecamatan Ploso telah menyusun APBDes dan P-APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja (Program)

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	86,76	73,75	84,36
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	100%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga

Dari tabel diatas rata-rata capaian kinerja program mulai tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami kenaikan.

Berikut kami sajikan perbandingan realisasi kinerja (program) tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

- Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Paten Kecamatan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Nilai PATEN tahun 2022 adalah 86,76

Nilai PATEN tahun 2023 adalah 73,75

Nilai PATEN tahun 2024 adalah 84,36

Pada tahun 2024 meningkat 10,61% dibandingkan tahun 2023

Pada tahun 2023 turun 13,01% dibandingkan tahun 2022
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- Indikator Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.
 - Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023 tercapai 100% (capaian 100%).
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :
- Indikator Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.
 - Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :
- Indikator Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi tahun 2024 telah tercapai 100% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.
 - Indikator Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun 2024 telah tercapai 26 lembaga sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja (Sasaran s/d. Sub Kegiatan)

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran s/d. Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan 2022					
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ploso	n/a	68,38	72,14	n/a
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	100%	n/a
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	n/a	100%	100%	n/a
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	n/a	3 dok	2 dok	n/a
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	n/a	5 lap	5 lap	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
	<i>Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Ploso yang difasilitasi	n/a	14 bln	14 bln	n/a
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	n/a	1 dok	1 dok	n/a
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	n/a	n/a	12 kali	n/a
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Ploso</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	n/a	n/a	13 stel	n/a
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	n/a	4 jenis	4 jenis	n/a
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	n/a	3 jenis	2 jenis	n/a
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	n/a	11 bulan	n/a	n/a
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	n/a	n/a	1 buku	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	n/a	n/a	10.257	n/a
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	n/a	1 jenis	1 jenis	n/a
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	3 kali	3 kali	n/a
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	n/a	2 gedung	n/a	n/a
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	n/a	4 unit	3 unit	n/a
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	n/a	12 bulan	12 bulan	n/a
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	n/a	5 jenis	2 jenis	n/a
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	<i>n/a</i>	<i>85%</i>	<i>85%</i>	<i>n/a</i>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	n/a	1 unit	1 unit	n/a
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	n/a	11 unit	9 unit	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Ploso yang dipelihara	n/a	1 unit	n/a	n/a
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	n/a	19 unit	15 unit	n/a
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	n/a	98,17	98,57	n/a
	IPP Kecamatan Ploso	n/a	0	3,16	n/a
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	n/a	86,76	73,75	n/a
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	n/a	100%	100%	n/a
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	n/a	100%	100%	n/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	n/a
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>	<i>n/a</i>	<i>3 lap</i>	<i>1 lap</i>	<i>n/a</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>4 dok</i>	<i>n/a</i>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	n/a	3 keg	1 keg	n/a
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	n/a	n/a	4 lap	n/a
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	n/a	100%	100%	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	n/a	100%	100%	n/a
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>	<i>n/a</i>	<i>12 lap</i>	<i>12 lap</i>	<i>n/a</i>
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	n/a	12 keg	12 keg	n/a
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	n/a	100%	100%	n/a
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	n/a	100%	100%	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	n/a	100%	100%	n/a
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dok</i>	<i>26 dok</i>	<i>n/a</i>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	n/a	26 lap	26 lap	n/a
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	n/a	100%	100%	n/a
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	n/a	100%	100%	n/a
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	26 lembaga	26 lembaga	n/a
<i>Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dok</i>	<i>26 dok</i>	<i>n/a</i>
	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	<i>n/a</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>n/a</i>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	n/a	26 dok	26 dok	n/a
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	n/a	13 Bumdes	13 Bumdes	n/a
	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	n/a	13 TP PKK	13 TP PKK	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Ploso	72	n/a	n/a	74,09
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	n/a	n/a	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	n/a	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	n/a	n/a	3 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	n/a	n/a	5 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	n/a	n/a	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	n/a	n/a	13 orang/bulan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	n/a	1 laporan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	n/a	12 dokumen
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Ploso</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapan	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	n/a	n/a	4 paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 paket	n/a	n/a	38 paket
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	n/a	2 paket
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	n/a	1 dokumen

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	n/a	n/a	6 laporan
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100%	n/a	n/a	100%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	n/a	n/a	20 unit
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	n/a	n/a	2 unit
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	1 unit
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	n/a	n/a	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	n/a	n/a	26 laporan
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	85%	n/a	n/a	85%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	9 unit	n/a	n/a	9 unit

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	n/a	n/a	9 unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,91	n/a	n/a	98,70
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	n/a	n/a	3,37
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	n/a	n/a	84,36
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	<i>100%</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>100%</i>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	n/a	n/a	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	100%
<i>Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA</i>	<i>1 laporan</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>1 laporan</i>

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>4 dokumen</i>
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	n/a	n/a	100 orang
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	n/a	4 dokumen
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	n/a	n/a	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	n/a	n/a	100%
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>12 kegiatan</i>
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	n/a	n/a	100%

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2022)	TAHUN N-1 (2023)	TAHUN 2024
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	n/a	n/a	100%
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	<i>26 dokumen</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>26 dokumen</i>
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	n/a	n/a	26 dokumen
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	n/a	n/a	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	n/a	n/a	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	n/a	n/a	26 lembaga
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	<i>26 lembaga</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>26 lembaga</i>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan

Tabel diatas disajikan dalam 2(dua) tingkat, dimana pada tingkatan pertama menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dan 2023. Sedangkan tingkatan kedua menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Sasaran Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,1	98,70	109,65%
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	84,36	101,02%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN				100,23%

Tahun 2024 merupakan periode Renstra 2024-2026 dengan 2 sasaran strategis kecamatan dan 6 indikator kinerja utama. Dari semua indikator sasaran s/d. program Kecamatan Ploso rata-rata telah berhasil mencapai target jangka menengah (Renstra) namun hanya 1 (satu) indikator saja yang tidak berhasil mencapai target Renstra yaitu IPP Kecamatan Ploso. Penjelasan capaian target jangka menengah (Renstra) kami jabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Ploso, realisasi tahun 2024 adalah 74,18 dari target Renstra sebesar 73. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ploso telah mencapai tingkat kemajuan 101,61% yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai melebihi target.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran:

1. IKM Kecamatan Ploso, realisasi tahun 2024 adalah 98,70 dari target Renstra sebesar 90,01. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ploso telah mencapai tingkat kemajuan 91,01% yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso belum mencapai target.karena pada waktu Penilaian Ruang Paten masih dilaksanakan Perbaikan/Perawatan Gedung Kantor Paten.
 2. IPP Kecamatan Ploso, realisasi tahun 2024 adalah 3,7 dari target akhir Renstra sebesar 3,37. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ploso belum mencapai target, dan baru tercapai 91,08% yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso tidak tercapai dan untuk kedepannya dibutuhkan strategi dan penanganan khusus untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terbaik agar kinerja IPP tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2025.
 3. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
 4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
 5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
2. Capaian Program terhadap Target Jangka Menengah
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Indikator Nilai PATEN Kecamatan, realisasi tahun 2024 adalah 84,36 dari target akhir Renstra sebesar 83,50. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ploso telah mencapai tingkat kemajuan 101,02% pada target Renstra.
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Indikator Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
 - Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Indikator Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
 - Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Indikator Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target akhir Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.
- Indikator Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, yang berarti target Renstra Kecamatan Ploso telah tercapai 100%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 target jangka menengah (Renstra) Kecamatan Ploso dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100,23%.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten hanya menyajikan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu nilai AKIP, IKM dan IPP karena 3 (tiga) indikator lainnya tidak ada rujukan dalam laporan kinerja nasional/provinsi/kabupaten. Ketiga indikator tersebut adalah :

1. Indikator persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional.
 2. Indikator persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional.
 3. Indikator persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten, provinsi dan nasional.
- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja (AKIP, IPP dan IKM)
Kecamatan Ploso dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional	Selisih Realisasi kinerja	Ket
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	74,18	64,23	115,49	9,95	Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso	98,70	90,76	108,74	7,94	Survei Kepuasan Masyarakat Tw II Tahun 2024 Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB
		IPP Kecamatan Ploso	3,37	3,88	86,85	-0,01	Indikator nasional adalah Indeks Pelayanan Publik Nasional

Sumber: LAKIP Kementerian PAN RB Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Ploso tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2024 Standar Nasional. Nilai SAKIP Kecamatan 74,18 (BB) sedangkan nilai SAKIP Nasional tahun 2024 rata-rata 64,23 ada selisih lebih sekitar 9,95 Poin. Untuk capaian nilai IKM Kecamatan Ploso adalah 98,70 sedangkan nilai IKM rata-rata nasional sebesar 90,76 ada selisih lebih sebesar 7,94 poin (karena standar nasional tahun 2024 nilainya belum

keluar sehingga masih menggunakan hasil survey kepuasan masyarakat Tw II tahun 2024 Deputy Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB). Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Ploso Tahun 2024 adalah 3,37 sedangkan nilai IPP rata rata nasional sebesar 3,88 dengan selisih kurang sebesar -0,01 poin (karena standar nasional tahun 2024 nilainya belum keluar sehingga masih menggunakan standar nasional tahun 2023).

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja di level provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi Jawa Timur

Uraian	Realisasi Kecamatan Ploso	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Selisih Realisasi kinerja
Nilai SAKIP	74,18	84,19	-10,01
IKM	98,70		
IPP	3,37		

Sumber: LAKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur tahun 2024 lebih baik daripada Kecamatan Ploso. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Ploso dibawah nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur dengan selisih -10,01 poin. Realisasi nilai IKM Kecamatan Ploso lebih baik dari nilai IKM Provinsi Jawa Timur dengan selisih poin. Realisasi nilai IPP Kecamatan Ploso dibawah nilai IPP Provinsi Jawa Timur dengan selisih poin.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja di level Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan realisasi kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Jombang

Uraian	Realisasi Kecamatan Ploso	Realisasi Kabupaten Jombang	Selisih Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP	74,18	72,33	1,85

IKM	98,70		
IPP	3,37		

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Ploso tahun 2024 lebih baik dibandingkan rata-rata realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Ploso lebih baik dari nilai SAKIP Kabupaten Jombang dengan selisih 1,85 poin. Realisasi nilai IKM Kecamatan Ploso lebih baik dari nilai IKM Kabupaten Jombang dengan selisih poin. Realisasi nilai IPP Kecamatan Ploso dibawah nilai IPP Kabupaten Jombang dengan selisih poin.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan yang tercermin dari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama kecamatan ada satu yang belum mencapai target yaitu nilai IPP Kecamatan dengan capaian persentase sebesar 95,75 % sehingga persentase realisasi capaian keseluruhan indikator kinerja utama tidak dapat mencapai target yaitu sebesar 3,37 namun capaian kinerja tersebut masih dalam kategori Baik dengan catatan. Secara rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas sasaran kecamatan tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN ATAS SASARAN KECAMATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%	2.626.137.164	2.441.160.782	92,96%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ploso	90,1	98,70	109,54%	3.470.000	2.217.700	63,91%
		IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%			
		Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	4.520.000	3.455.250	76,44%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%

	Persentase PHBN/PHBA dan monev Sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	41.999.600	40.899.000	97,38%	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	47.640.000	46.150.000	96,87%	
RATA-RATA					100,28%	2.769.129.264	2.577.639.582	93,08 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas sasaran kecamatan Ploso tahun 2024 adalah sbb :

1. Sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso capaian kinerjanya 101,61% dengan realisasi anggaran 92,96%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian diatas 100%.

2. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan dengan indikator :

- IKM Kecamatan Ploso capaian kinerjanya 109,54% dengan realisasi anggaran 63,91%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian diatas 100%.
- IPP Kecamatan Ploso capaian kinerjanya 91,08% dengan realisasi anggaran 63,91%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan masih belum dapat menunjang kinerja keseluruhan, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dibawah 100%.
- Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait capaian kinerjanya 100% dengan realisasi anggaran 99,98%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian 100%.
- Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu capaian kinerjanya 100% dengan realisasi anggaran 97,33%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian 100%.
- Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu capaian kinerjanya 100% dengan realisasi anggaran 89,58%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan efisiensi anggaran tetap dapat mencapai kinerja dengan capaian 100%.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun

kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
3. Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Ploso. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil.
4. Dukungan dan komitmen Camat Ploso, Kepala UPTD se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder kecamatan dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ploso untuk mencapai tujuan organisasi.

B. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Ploso sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Ploso.
2. Tingkat Kinerja Pelayanan PD masih kurang
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja dan pendukung pelayanan PATEN seperti perluasan ruang PATEN, toilet difabel, CCTV, mesin antrian ,dll.
4. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan tupoksi.

C. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Permohonan tambahan pegawai Kecamatan Ploso
- b. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- c. Evaluasi kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target (IPP Kecamatan) untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi agar kedepannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- d. Mengajukan tambahan anggaran PAK 2024 untuk pembangunan gedung

PATEN dan kantor kecamatan serta pengadaan sarana prasarana PATEN seperti CCTV dan mesin antrian.

- e. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
- f. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

D. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan

Kecamatan Ploso menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	2.441.160.782	92,96%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja nilai SAKIP dan capaian kinerja aparatur. Program ini juga sangat menunjang kegiatan rutin, penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	2.062.800,00	99,88%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100%	7.981.000	99,58%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100%	404.250	78,65%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	1.896.550.548	91,83%	Sangat Menunjang kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%			Sangat Menunjang kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	100%	1.896.550.548	91,83%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%	641.200	91,6%	Sangat Menunjang kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%	66.810.000	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan penatausahaan keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	114.277.312	89,55%	Sangat Menunjang kegiatan rutin
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	100%	5.266.500	91,58%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 paket	100%	26.392.500	100%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan ATK dan alat kebersihan/bahan pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%	41.280.000	85,29%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan makanan dan minuman pegawai
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%	7.482.750	93,71%	Sangat Menunjang kegiatan rutin fotocopy dan cetak amplop dinas
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%	2.330.000	99,06%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan surat kabar Jawa Pos
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	100%	31.525.562	85,81%	Sangat Menunjang kegiatan perjalanan dinas ASN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan tanah, gedung dan sarana prasarana

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	100%		%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan sarana prasarana gedung kantor
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100%		%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	100%		%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan kantor kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	127.450.541,00	99,19%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran tagihan listrik, honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta pembayaran PBB
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	24.771.075,00	98,30%	Sangat Menunjang kegiatan rutin pembayaran tagihan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	100%	106.380.000	100%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan pembayaran PBB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	100%	168.887.100	98,38%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana prasarana kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	9 unit	100%	35.331.000	93,97%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 unit	100%	24.929.500	100%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	84,36	101,02%	2.217.700	63,91%	Kurang menunjang pencapaian kinerja penilaian IPP tetapi Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian PATEN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	2.217.700	63,91%	Kurang menunjang pencapaian kinerja penilaian IPP tetapi Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian PATEN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	2.217.700	63,91%	Kurang menunjang pencapaian kinerja penilaian IPP tetapi Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian PATEN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	87.049.000	97.11%	Sangat Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%			Sangat Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	100%	87.049.000	97.11%	Sangat Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100%			Sangat Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	40.899.000	97,38%	Sangat Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	46.150.000	96,87%	Sangat Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	3.455.250	76,44%	Sangat Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100%	3.455.250	76,44%	Sangat Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100%	3.455.250	76,44%	Sangat Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	4.546.350	89,58%	Sangat Menunjang kegiatan pertanggungjawaban realisasi APBDesa
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%			Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	100%	4.546.350	89,58%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100%	4.546.350	89,58%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	39.210.500	97,33%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan desa
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	100%			Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK dan BUMDesa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	100%	39.210.500	97,33%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK dan BUMDesa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	39.210.500	97,33%	Sangat Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK dan BUMDesa
REALISASI				2.577.639.582	93,08%	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

a. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

3. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

4. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

b. Program/Kegiatan yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ploso Tahun 2024, bahwa untuk mendukung tujuan organisasi ditetapkan 2 sasaran strategis Kecamatan dan untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2024 ini Kecamatan Ploso mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.769.129.264 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.577.639.582 atau serapan dana APBD mencapai 93,08% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran Silpa Rp. 191.487.682 Dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 168.645.930 Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.19
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	2.626.137.164	92,96%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso	3.470.000	63,91%
		IPP Kecamatan Ploso		
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	4.520.000	76,44%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat	40.287.500	97,33%

		waktu		
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	5.075.000	89,58%
		Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	41.999.600	97,38%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	47.640.000	96,87%
TOTAL			2.769.129.264	93,08%

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

- a. Secara rinci realisasi kinerja dan realisasi anggaran sasaran s/d. program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%	2.626.137.164	2.441.160.782	92,96%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.626.137.164	2.441.160.782	92,96%
Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso	90,01	98,70	109,54%	3.470.000	2.217.700	63,91%
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	84,36	101,03%			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	4.520.000	3.455.250	76,44%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	4.520.000	3.455.250	76,44%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (SASARAN)				101,85%	2.769.129.264	2.577.639.582	93,08%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM)				91,38%			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (SASARAN & Program)				111,45%			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan OPD yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan publik, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93,08% telah menghasilkan kinerja sebesar 101,85% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 6,92%. Untuk capaian program dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93,08% telah menghasilkan kinerja sebesar 101,85% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 8,77%. Untuk capaian kinerja secara keseluruhan (sasaran s/d. program) dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93,08% telah menghasilkan kinerja sebesar 111,45% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 18,37%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Ploso dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Ploso Tahun 2024

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%	2.626.137.164	2.441.160.782	92,96%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.626.137.164	2.441.160.782	92,96%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	8.529.000	8.385.250	98,31%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%	8.015.000	7,981,000	99,58%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100%	514.000	1404.250	78,65%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	2.132.706.478	1.896.550.548	91,83%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	13 orang/bulan	100%	2.065.196.478	1.896.550.548	91,83%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	7.984.950	7.482.750	93,71%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	66.810.000	66.810.000	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Ploso	20 paket	20 paket	20 paket	12.000.000	12.000.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	127.617.314	114.277.312	89,55%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	5.750.500	5.266.500	91,58%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 paket	43 paket	100%	26.392.864	26.392.500	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	48.400.000	41.280.000	85,29%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	7.984.950	7.482.750	98,71%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.352.000	2.330.000	99,06%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100%	36.737.000	31.525.562	85,81%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	-	-	%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	100%	-	-	%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	99.481.600	99,48%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	147.159.372	147.159.372	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	40.779.372	40.779.372	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	26 laporan	100%	106.380.000	106.380.000	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	100%	171.675.000	168.887.100	98,38%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	9 unit	9 unit	100%	37.600.000	35.331.000	93,97%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
dinas operasional atau lapangan	perizinannya				24.930.000	24.929.500	100%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%			
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	9.145.000	9.145.000	100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso	90.1	98,70	109,54%	5.075.000	4.546.350	89,58%
	IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%			

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50	73,75	101,66%	3.470.000	2.217.700	63,91%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	3.470.000	2.217.700	63,91%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	3.470.000	87.049.000	63,91%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	89.639.600		
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	1 laporan	100%	89.639.600	87.049.000	97,11%
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%	41.999.600	40.899.000	97,38%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%	47.640.000	46.150.000	96,87%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	3.435.000	3.343.500	99,99%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	4.520.000	3.455.250	76,44%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	4.520.000	3.455.250	76,44%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100%	4.520.000	3.455.250	76,44%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%

SASARAN/ PROGRAM/KEGITA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%	5.075.000	4.546.350	89,58%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	43.244.500	43.242.000	99,99%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%

SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Desa yang Menyusun RKPDesa	4 laporan	4 laporan	100%	40.287.500	39.210.500	97,33%
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				100,28%	2.769.129.264	2.577.639.582	93,08%

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ploso sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2024-2026 Kecamatan Ploso yakni:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi didapatkan dari capaian kinerja dikurangi ketersediaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Ploso melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Ploso langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

- c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.
- d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
- f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Ploso melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	SASARAN: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso	101.61%	93,08%	8,53
	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	101.61%	93,08%	8,53
2.	SASARAN: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan				
	IKM Kecamatan Ploso		109,54%	100%	9,54
	IPP Kecamatan Ploso		91,08%		-8,92
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	101,02%	93,08%	7,94

NO	SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	97,11%	2,89
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	97,11%	2,89
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait		100%	76,44%	23,56
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	76,44%	23,56
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu		100%	89,58%	0,1
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	89,58%	0,1
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	89,58%	0,1
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu		100%	97,33%	2,6
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	97,33%	2,6
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%	97,33%	2,6
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN			101,28%	93,08%	8,2

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 8,2. Hasil tersebut bisa dilihat dari capaian kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran dari sasaran sampai dengan sub kegiatan kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.23

Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran s/d. Sub Kegiatan

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	%CAPAIANKINERJA	%PENYERAPANANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	SASARAN: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso	101,61%	93,08%	8,53
	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	101,61%	93,08%	8,53
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	98,31%	1,69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	99,58%	0,42
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	78,65%	21,35
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	91,83%	8,17
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		8,17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	91,83%	8,17
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	93,71%	6,29
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	89,55%	10,45
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	91,58%	8,42
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	0
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	88,29%	11,71
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	98,71%	1,29

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	99,06%	0,94
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	85,81%	14,19
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	99,48%	0,52
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	%	0
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	99,48%	0,52
	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	100%	%	0
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	0
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	98,38%	1,62
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	100%	93,97%	6,03
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	0
	SASARAN: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan				
	IKM Kecamatan Ploso		90,01%	98,70%	-8,69
	IPP Kecamatan Ploso		3,70%		0,33
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83,50%	84,36%	-0,86
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	63,91%	36,09

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	63,91%	36,09
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	97,11%	2,89
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		2,89
	Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	100%	97,11%	2,89
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	100%		2,89
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	97,38%	2,62
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	96,87%	3,13
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait		100%	76,44%	23,56
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	76,44%	23,56
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	100%	76,44%	23,56
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	76,44%	23,56
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu		100%	89,58%	10,42
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	99,90%	0,1
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%		0,1

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100%	89,58%	10,4
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	89,58%	10,42
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu		100%	99,99%	0,01
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	97,33%	2,67
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100%		2,67
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100%	97,33%	2,67
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	97,33%	2,67
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN			100%	93,08%	6,92

Selain penggunaan anggaran, sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Sarana dan Prasarana Tahun 2024			EFISIENSI SDM
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM	
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	73	74,18	101,61%	42	19	45%	56,61%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso	90,1	98,70	109,54%	8	2	25%	84,54%
		IPP Kecamatan Ploso	3,7	3,37	91,08%	8	2	25%	66,08%
		Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	9	3	33,3%	66,7%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	8	2	25%	75%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	5	2	40%	60%
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA					100,37%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		32,21%	68,16%
TINGKAT EFISIENSI SDM									68,16%

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pada kisaran 68,16% dimana dari 42 anjab ABK Kecamatan Ploso ketersediaan SDM adalah 19 dengan persentase ketersediaan 45,23% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 100,37%.

Kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana prasarana yang ada pada Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
1	Stasion wagon	1	1	100%
2	Sepeda Motor	29	29	100%
3	Air conditioning unit	4	4	100%
4	Filing besi /metal	2	2	100%
5	Papan nama instansi	1	1	100%
6	Papan pengumuman	2	2	100%
7	Alat kantor lainnya	3	3	100%
8	Iemari kayu	2	2	100%
9	Rak kayu	1	1	100%
10	Meja kayu / rotan	10	10	100%
11	Meja tulis	2	2	100%
12	Kursi Rapat	119	119	100%
13	Kursi tamu	1	1	100%
14	kursi putar	9	9	100%
15	Bangku tunggu	6	6	100%

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
16	Kursi lipat	50	50	100%
17	Meja computer	2	2	100%
18	Sofa	1	1	100%
19	Ac unit	1	1	100%
20	Ac split	5	5	100%
21	Kipas Angin	4	4	100%
22	Kompom Komperesor	1	1	100%
23	Televisi	3	3	100%
24	sound system	6	6	100%
25	Microphone	1	1	100%
26	Stabiliser	3	3	100%
27	Alat rumah tangga lain	2	2	100%
28	Alat pemadam portable	4	4	100%
29	p.c unit	6	6	100%
30	Laptop	10	10	100%
31	Note Book	1	6	100%
32	printer	10	10	100%
33	Cpu	1	10	100%
34	Monitor	1	1	100%
35	Peralatan sidik jari	1	2	100%
36	Kursi pejabat eselon IV	2	2	100%
37	Kursi kerja pejabat	5	5	100%
38	Buffet kayu	1	1	100%
39	lemari & arsip pejabat	6	6	100%
40	Proyektor & attachment	1	1	100%
41	Microphone / Wirelles mic	1	1	100%
42	Proyektor & attachment	1	1	100%
43	Microphone / Wirelles mic	1	1	100%
44	Tanah,Gedung Kantor	2	2	100%

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1	2	3	4	5
	TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	133	133	100%

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Sarana dan Prasarana Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Hasil Reko n 2022	Usulan Standar Kebutuh an	% Keterse diaan Sarpras
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	71	72,14	101,60%	304	304	100%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso	IKM Kecamatan Ploso	98,17	98,57	100,40%			
		IPP Kecamatan Ploso	3,3	3,16	95,75%			
		Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%			
		Persentase Laporan pertanggungjawa ban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%			
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%				
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA					99,62%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		100%
TINGKAT EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA					35,13%			

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sarana dan prasarana pada kisaran 100% dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang 100%.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan tambahan pegawai Kecamatan Ploso
2. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
3. Evaluasi kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target (IPP Kecamatan) untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi agar kedepannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

IPP Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 3,3 terealisasi 3,16 (capaian 95,75%). Nilai IPP Kecamatan Ploso belum berhasil mencapai target yang ditetapkan karena pada saat penilaian IPP sarana dan prasarana pendukung PATEN sebenarnya sudah dianggarkan pada P-APBD 2024 (pos jaga, tempat parkir pelayanan, playground, kursi tunggu pelayanan dan papan nama PATEN) namun belum dapat direalisasikan karena angkas P-APBD 2024 dianggarkan di Bulan Oktober 2024, sementara penilaian IPP dilakukan pada 30 September 2024.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 berdasarkan hasil IPP tahun 2024 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

a. Aspek kebijakan pelayanan:

- Menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan unsur masyarakat.
- Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.
- Standar Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial

- Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Melakukan survey kepuasan masyarakat dengan menyediakan kotak kepuasan pelayanan
 - Setiap unit layanan menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi SKM
- b. Aspek Profesionalisme SDM:
- Memberikan respon layanan secepatnya
- c. Aspek sarana dan prasarana:
- Mengajukan tambahan anggaran PAK 2024 untuk pembangunan gedung PATEN dan kantor kecamatan serta pengadaan sarana prasarana PATEN seperti CCTV dan lemari es.
 - Menyediakan petugas khusus yang membantu untuk pengguna layanan difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya.
- d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
- Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
- e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan
- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 - Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
- f. Aspek Inovasi
- Pelayanan kecamatan Ploso mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.
4. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
5. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ploso pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Ploso dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2024 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Ploso Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ploso telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik meskipun belum memenuhi target, kinerjanya telah terealisasi 98,48% atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ploso Tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator IKU, ada 5 indikator IKU yang mencapai/melebihi target dan ada 1 (satu) indikator IKU (nilai IPP Kecamatan Ploso) yang tidak mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Ploso tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Ploso	71	72,14	101,60%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	IKM Kecamatan Ploso	98,17	98,57	100,40%

pemerintahan dan layanan Kecamatan				
	IPP Kecamatan Ploso	3,3	3,16	95,75%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100.00%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100.00%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100.00%
Rata-rata Capaian IKU				98,48%

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 71 terealisasi 72,14 (tercapai 101,60%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor X.700/526/415.15/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Sehingga indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ploso melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Ploso dengan indikator kinerja :

1. IKM Kecamatan Ploso

IKM Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 98,17 terealisasi 98,57 (tercapai 100,40%). Nilai IKM Kecamatan Ploso telah berhasil melebihi target yang ditetapkan.

2. IPP Kecamatan Ploso

IPP Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 3,3 terealisasi 3,16 (capaian 95,75%). Nilai IPP Kecamatan Ploso belum berhasil mencapai target yang ditetapkan karena pada saat penilaian IPP sarana dan prasarana pendukung PATEN sebenarnya sudah dianggarkan pada P-APBD 2024 (pos jaga, tempat parkir pelayanan, playground, kursi tunggu pelayanan dan papan nama PATEN) namun belum dapat direalisasikan karena angkas P-APBD 2024 dianggarkan di Bulan Oktober 2024, sementara penilaian IPP dilakukan pada 30 September 2024.

3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berkat kerjasama yang baik antar stakeholder. Setiap kasus pelanggaran Perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu.

Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berkat kerjasama yang baik dengan desa. Setiap desa di Kecamatan Ploso telah melaporkan realisasi APBDesa tepat waktu berupa LRA Semester 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu.

Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu target tahun 2024 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%). Setiap Desa di Kecamatan Ploso telah menyusun Raperdes APBDes dan Raperdes Perubahan APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Permohonan tambahan pegawai Kecamatan Ploso
2. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
3. Evaluasi kinerja tahun 2024 yang tidak mencapai target (IPP Kecamatan) untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi agar kedepannya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

IPP Kecamatan Ploso target tahun 2024 adalah 3,3 terealisasi 3,16 (capaian 95,75%). Nilai IPP Kecamatan Ploso belum berhasil mencapai target yang ditetapkan karena pada saat penilaian IPP sarana dan prasarana pendukung PATEN sebenarnya sudah dianggarkan pada P-APBD 2024 (pos jaga, tempat parkir pelayanan, playground, kursi tunggu pelayanan dan papan nama PATEN) namun belum dapat direalisasikan karena angkas P-APBD 2024 dianggarkan di Bulan Oktober 2024, sementara penilaian IPP dilakukan pada 30 September 2024.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 berdasarkan hasil IPP tahun 2024 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

b. Aspek kebijakan pelayanan:

- Menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan unsur masyarakat.
- Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.
- Standar Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial

- Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Melakukan survey kepuasan masyarakat dengan menyediakan kotak kepuasan pelayanan
 - Setiap unit layanan menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi SKM
- b. Aspek Profesionalisme SDM:
- Memberikan respon layanan secepatnya
- c. Aspek sarana dan prasarana:
- Mengajukan tambahan anggaran PAK 2024 untuk pembangunan gedung PATEN dan kantor kecamatan serta pengadaan sarana prasarana PATEN seperti CCTV dan mesin antrian.
 - Menyediakan petugas khusus yang membantu untuk pengguna layanan difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya.
- d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
- Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
- e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan
- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 - Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
- f. Aspek Inovasi
- Pelayanan kecamatan Ploso mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.
4. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
5. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
- Langkah-langkah yang dilakukan :
1. Strategi perbaikan AKIP pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Menyajikan hambatan pencapaian indikator kinerja secara konkrit pada Berita Acara monitoring jangka menengah.
- Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.
- Memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya.
- Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai target yang ditetapkan.
- Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan.

2. Strategi perbaikan nilai IKM yaitu:

a. Kompetensi petugas

- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.
- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
- Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun.
- Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon.
- Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan.
- Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

Mengajukan tambahan anggaran PAK 2024 untuk pembangunan gedung PATEN dan kantor kecamatan serta pengadaan sarana

prasarana PATEN seperti CCTV dan Mesin antrian.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Ploso, 4 Februari 2025

CAMAT PLOSO

